



TATA KELOLA KEUANGAN

Raih Opini WTP ke-17, Pemkot Jogja Harus Perkuat Kualitas Akuntabilitas

Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja kembali mencatatkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-17 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DIY. Capaian ini disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025.

Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, menegaskan capaian opini WTP tidak boleh membuat jajaran pemerintah daerah terlena. Dia menekankan bahwa kualitas akuntabilitas penggunaan anggaran harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar mempertahankan predikat.

Menurutnya, laporan keuangan yang baik harus selaras dengan

kualitas hasil pembangunan di lapangan. Dia mencontohkan, proyek yang secara administratif dapat dipertanggungjawabkan harus diiringi dengan kualitas fisik bangunan yang benar-benar baik. "Bukan hanya kuantitas capaian, tetapi kualitas penggunaan anggaran yang harus terus ditingkatkan," ujarnya di Kantor BPK RI Perwakilan DIY, Rabu (1/4).

Selain itu, Hasto juga menyoroti pentingnya akurasi data dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, termasuk pemutakhiran data kependudukan agar program pemerintah tepat sasaran.

Temuan dan Catatan

Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi DIY, Agustin Sugihartatik, menjelaskan opini WTP diberikan berdasarkan

kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Meski meraih opini tertinggi, BPK tetap menemukan sejumlah catatan yang harus segera ditindaklanjuti Pemkot Jogja, meliputi risiko kehilangan persediaan senilai Rp1,4 miliar di Dinas PUPKP akibat catatan mutasi yang tidak dapat ditelusuri, dan pengelolaan cadangan pangan berupa 350 kilogram beras yang mengalami penurunan kualitas.

Selain itu, terdapat persoalan administrasi aset tetap pada 40 kawasan perumahan yang prasarana, sarana, dan utilitas (PSU)-nya belum bersertifikat, akibat kendala prosedur penyerahan dari pihak pengembang.

Menanggapi temuan tersebut, Hasto memastikan Pemkot Jogja akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI Perwakilan DIY dalam waktu 60 hari. "Tindak lanjut dinyatakan selesai jika rekomendasi BPK telah terpenuhi, termasuk pengembalian kelebihan pembayaran ke kas negara bila ada," kata Agustin.

Sementara, Wakil Ketua I DPRD Kota Jogja, RM Sinarbiyat Nujanat, menegaskan DPRD Kota Jogja siap mengawal pelaksanaan rekomendasi BPK RI Perwakilan DIY agar pengelolaan keuangan daerah tetap transparan dan akuntabel. "Kami berkomitmen untuk mengawal dan mengawasi setiap butir rekomendasi yang tertuang dalam LHP ini dengan penuh keseriusan," katanya. (Stefani Yulindriani/*)



Harian Jogja/Stefani Yulindriani
 Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo menyampaikan sambutan dalam penyerahan LHP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK RI Perwakilan DIY, Rabu (1/4).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005